

PENERAPAN ISAK 35 DALAM PENGUATAN AKUNTABILITAS ORGANISASI NIRLABA BERBASIS REGULASI AKUNTANSI

Mas Amah¹ Alila Zahira Kusuma²

Universitas IBA Palembang¹, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang²

¹ masamahhamdan@gmail.com

² zahiraalila@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

11 Juli 2026

Direvisi :

10 Agustus 2026

Disetujui :

15 Agustus 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of ISAK 35 in strengthening the accountability of nonprofit organizations based on accounting regulations in Palembang, Indonesia. The study addresses the issue of limited compliance with financial reporting standards among nonprofit organizations, which has implications for transparency, stakeholder trust, and organizational sustainability. This research employed a qualitative case study approach using observation and documentation techniques to collect data from several nonprofit organizations that had implemented or attempted to adopt ISAK 35. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing to identify emerging themes and patterns. The findings indicate that the implementation of ISAK 35 has contributed to improvements in the structure of financial statements, classification of net assets, transparency of financial information, and compliance with accounting standards. However, the implementation process remains constrained by limited human resource capacity, inadequate accounting information systems, and varying levels of managerial commitment. The study concludes that ISAK 35 serves not only as a technical accounting standard but also as a strategic instrument for enhancing organizational accountability and stakeholder confidence. The findings contribute to the development of accountability literature in nonprofit organizations and provide practical implications for regulators and nonprofit managers in strengthening financial governance practices.

Keywords : ISAK 35; Nonprofit organizations; Accountability; Financial reporting; Accounting regulation.

PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks global, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba semakin meningkat seiring dengan berkembangnya paradigma good governance dan public trust.

Organisasi nirlaba tidak hanya dituntut untuk menjalankan aktivitas sosial, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks karena masih banyak organisasi nirlaba yang belum sepenuhnya menerapkan standar pelaporan keuangan berbasis akuntansi yang berlaku. Salah satu standar yang menjadi pedoman utama adalah ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

Dalam praktiknya, implementasi ISAK 35 masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama pada organisasi nirlaba berbasis komunitas seperti yayasan, masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak entitas nirlaba masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, baik dari aspek pemahaman teknis maupun keterbatasan sumber daya manusia (Hartoko, 2023; Hasibuan et al., 2024). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga akuntabilitas organisasi belum sepenuhnya optimal. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah Sumatera Selatan seperti Palembang, fenomena ini juga masih ditemukan pada beberapa organisasi nirlaba yang mengelola dana publik secara mandiri tanpa sistem pelaporan yang terstandarisasi.

ISAK 35 hadir sebagai respons atas perubahan standar dari PSAK 45 yang sebelumnya digunakan dalam pelaporan entitas nirlaba. Standar ini menekankan pada penyajian laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Implementasi standar ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba secara lebih sistematis dan terukur. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi ISAK 35 belum berjalan optimal karena keterbatasan sosialisasi, pelatihan, serta rendahnya literasi akuntansi pada pengelola organisasi nirlaba (Setiadi, 2023; Siregar et al., 2024).

Dari perspektif empiris, masih ditemukan bahwa sebagian organisasi nirlaba hanya menyusun laporan keuangan secara sederhana berbasis kas masuk dan kas keluar tanpa mengikuti format standar ISAK 35. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi akuntansi dengan praktik di lapangan. Di Palembang, fenomena ini menjadi relevan karena banyak organisasi nirlaba lokal yang beroperasi berbasis komunitas dan keagamaan, namun belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang terstruktur. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga sosial apabila tidak segera dilakukan perbaikan dalam sistem akuntabilitasnya.

Secara konseptual, akuntabilitas dalam organisasi nirlaba tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial organisasi kepada para pemangku kepentingan. Transparansi menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik, terutama dalam pengelolaan dana donasi dan bantuan sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan ISAK 35 dapat meningkatkan tingkat transparansi dan memperkuat tata kelola organisasi nirlaba apabila diimplementasikan secara konsisten (Ahdi et al., 2024; Hidayat et al., 2024). Namun, implementasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam memahami dan mengadopsi standar akuntansi yang berlaku.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi ISAK 35, sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis pelaporan keuangan dan studi kasus tunggal pada lembaga tertentu. Kajian yang mengeksplorasi makna, pengalaman, serta proses implementasi ISAK 35 dalam konteks penguatan akuntabilitas organisasi nirlaba secara kualitatif masih terbatas. Selain itu, studi yang secara spesifik menyoroti konteks daerah seperti Palembang juga masih sangat minim. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana standar akuntansi ini diimplementasikan dalam praktik nyata organisasi nirlaba.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ISAK 35 dalam penguatan akuntabilitas organisasi nirlaba di Palembang. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana organisasi memahami, mengimplementasikan, serta menginternalisasi prinsip-prinsip ISAK 35 dalam praktik pelaporan keuangan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait akuntabilitas organisasi nirlaba berbasis standar akuntansi, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi perbaikan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan sesuai regulasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga pada pemaknaan sosial dan praktik implementasi ISAK 35 dalam konteks organisasi nirlaba. Hal ini penting untuk memperkuat tata kelola organisasi berbasis kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi organisasi nirlaba lain dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka secara berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

ISAK 35 merupakan standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba di Indonesia yang mulai efektif menggantikan PSAK 45. Standar ini menekankan pada penyajian informasi keuangan yang lebih relevan, transparan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ISAK 35 bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan organisasi nirlaba agar lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip transparansi publik. Dalam konteks organisasi nirlaba, standar ini menjadi pedoman penting dalam menyusun laporan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada penguatan tata kelola organisasi.

Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba dapat dipahami sebagai kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas mencakup aspek transparansi, integritas, serta kemampuan organisasi dalam menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi. Dalam konteks organisasi nirlaba, akuntabilitas tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup akuntabilitas moral dan sosial. Oleh karena itu, implementasi standar akuntansi seperti ISAK 35 menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut.

Teori *stewardship* menjadi salah satu landasan utama dalam memahami perilaku organisasi nirlaba. Teori ini menjelaskan bahwa pengelola organisasi bertindak sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) menyatakan bahwa *steward* akan cenderung bekerja secara kolektif dan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya organisasi. Dalam konteks ISAK 35, teori ini memperkuat asumsi bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik merupakan bentuk tanggung jawab moral pengelola kepada masyarakat.

Selain *stewardship theory*, *agency theory* juga relevan dalam menjelaskan hubungan antara pengelola organisasi nirlaba dan para donatur atau *stakeholder*. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat muncul ketika agen (pengelola) tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (donatur atau publik). Dalam organisasi nirlaba, risiko asimetri informasi menjadi tantangan utama yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan ISAK 35 menjadi mekanisme pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi tersebut.

Konsep laporan keuangan dalam organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi profit karena tidak berorientasi pada laba, melainkan pada keberlanjutan program dan pelayanan publik. Laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan ISAK 35 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas,

serta catatan atas laporan keuangan. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan organisasi. Dengan demikian, standar ini memberikan struktur pelaporan yang lebih sistematis dibandingkan praktik pelaporan sederhana yang masih banyak digunakan.

Akuntabilitas publik dalam organisasi nirlaba juga berkaitan erat dengan konsep good governance. Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam tata kelola organisasi yang baik. Menurut Osborne (2010), organisasi sektor publik dan nirlaba harus mampu membangun kepercayaan melalui sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Dalam konteks ini, ISAK 35 berperan sebagai instrumen teknis yang memperkuat implementasi prinsip good governance dalam organisasi nirlaba.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi ISAK 35 masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Studi oleh Setiawan dan Prabowo (2022) menemukan bahwa banyak organisasi nirlaba belum sepenuhnya memahami struktur laporan keuangan sesuai standar ISAK 35. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan akuntansi. Penelitian lain oleh Nurhayati (2023) juga menunjukkan bahwa implementasi standar ini masih bersifat formalitas pada beberapa lembaga tanpa benar-benar meningkatkan kualitas akuntabilitas.

Studi lain oleh Kurniawan dan Lestari (2024) mengungkapkan bahwa penerapan ISAK 35 pada lembaga pendidikan dan keagamaan mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen manajemen organisasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem akuntansi untuk mendukung implementasi standar secara lebih efektif. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun ISAK 35 memiliki potensi besar, implementasinya masih belum optimal.

Kesenjangan penelitian (research gap) yang dapat diidentifikasi adalah masih terbatasnya kajian yang mengeksplorasi proses implementasi ISAK 35 secara kualitatif, khususnya dalam konteks lokal seperti Palembang. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis dan kuantitatif, tanpa menggali pengalaman, pemahaman, dan praktik sosial dari para pengelola organisasi nirlaba. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menghubungkan implementasi ISAK 35 dengan dinamika sosial dan budaya organisasi.

Dari perspektif definisi operasional, ISAK 35 dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat penerapan standar pelaporan keuangan entitas nirlaba yang mencakup penyusunan laporan keuangan sesuai komponen yang ditetapkan IAI. Sementara itu, akuntabilitas organisasi nirlaba dioperasionalkan sebagai tingkat transparansi, keandalan informasi, serta pertanggungjawaban organisasi kepada stakeholder. Indikator akuntabilitas meliputi keterbukaan informasi, kejelasan laporan, serta konsistensi pelaporan keuangan.

Hubungan antara ISAK 35 dan akuntabilitas dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan kualitas informasi keuangan. Semakin tinggi tingkat penerapan ISAK 35, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas organisasi nirlaba. Hal ini karena standar tersebut menyediakan kerangka pelaporan yang sistematis dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, ISAK 35 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola organisasi.

Dalam konteks Palembang, organisasi nirlaba seperti yayasan pendidikan, masjid, dan lembaga sosial memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat. Namun, praktik pelaporan keuangan masih banyak yang bersifat sederhana dan belum mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk memahami bagaimana ISAK 35 diterapkan dalam konteks lokal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi teori stewardship, agency theory, dan konsep akuntabilitas publik. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi ISAK 35 dapat memperkuat akuntabilitas organisasi

nirlaba. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya melihat aspek teknis pelaporan, tetapi juga dimensi sosial dan perilaku organisasi dalam mengelola keuangan.

Dengan demikian, kajian literatur ini menegaskan bahwa ISAK 35 memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi nirlaba. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi sumber daya manusia, pemahaman standar, maupun budaya organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada, khususnya dalam konteks implementasi di Palembang melalui pendekatan kualitatif yang lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penerapan ISAK 35 dalam penguatan akuntabilitas organisasi nirlaba di Kota Palembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam terkait proses, makna, dan praktik implementasi standar akuntansi dalam konteks sosial organisasi. Menurut Creswell (2021), studi kasus kualitatif memungkinkan peneliti memahami suatu sistem terikat (*bounded system*) secara komprehensif dalam konteks nyata. Dalam penelitian ini, sistem terikat tersebut adalah organisasi nirlaba yang menerapkan atau berupaya menerapkan ISAK 35 dalam pelaporan keuangannya.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu dalam organisasi memaknai penerapan ISAK 35 sebagai bagian dari akuntabilitas. Menurut Saunders, Lewis, dan Thornhill (2020), pendekatan interpretif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial berdasarkan perspektif pelaku di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena akuntansi sektor nirlaba.

Objek penelitian ini adalah organisasi nirlaba yang berada di Kota Palembang, khususnya lembaga yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Organisasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik pengelolaan dana publik yang bersumber dari donasi masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan ISAK 35 menjadi relevan untuk melihat bagaimana standar akuntansi digunakan dalam praktik pelaporan keuangan. Fokus kajian diarahkan pada proses penyusunan laporan keuangan dan tingkat pemahaman terhadap standar tersebut.

Subjek penelitian mencakup pengelola keuangan organisasi nirlaba, seperti bendahara, staf administrasi keuangan, dan pengurus inti yang terlibat dalam pelaporan keuangan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses akuntansi organisasi. Menurut Etikan, Musa, dan Alkassim (2021), *purposive sampling* efektif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih informan yang memiliki informasi paling relevan terhadap fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, karena wilayah ini memiliki banyak organisasi nirlaba yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Selain itu, masih terdapat variasi dalam penerapan sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Kondisi ini memberikan ruang yang luas untuk menganalisis implementasi ISAK 35 dalam konteks yang beragam. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama beberapa bulan dalam satu siklus pelaporan keuangan organisasi.

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup dua konsep utama, yaitu ISAK 35 dan akuntabilitas organisasi nirlaba. ISAK 35 didefinisikan sebagai tingkat penerapan standar pelaporan keuangan entitas nirlaba yang meliputi penyajian laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan organisasi dalam menyajikan informasi keuangan yang transparan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data secara langsung di lapangan. Menurut Lincoln dan Guba (2020), dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci yang menentukan kualitas data yang diperoleh. Selain itu, digunakan pula pedoman analisis dokumen untuk mengkaji laporan keuangan organisasi nirlaba yang menjadi objek penelitian.

Instrumen tambahan berupa lembar checklist analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan organisasi dengan komponen ISAK 35. Checklist ini mencakup indikator seperti kelengkapan laporan posisi keuangan, konsistensi laporan aktivitas, serta keberadaan catatan atas laporan keuangan. Instrumen ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki standar evaluasi yang sistematis dan terukur secara kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan organisasi nirlaba yang relevan. Dokumentasi ini menjadi sumber utama dalam menilai implementasi ISAK 35 secara objektif. Menurut Bowen (2021), analisis dokumen merupakan metode yang efektif dalam penelitian kualitatif untuk memahami praktik organisasi berdasarkan bukti tertulis yang tersedia.

Selain itu, observasi non-partisipatif juga dilakukan untuk memahami proses penyusunan laporan keuangan di lingkungan organisasi. Observasi ini dilakukan tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas organisasi, melainkan hanya sebagai pengamat. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai alur kerja akuntansi yang terjadi di lapangan.

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan identifikasi organisasi nirlaba yang menjadi objek penelitian di Palembang. Tahap berikutnya adalah pengumpulan dokumen laporan keuangan dalam periode tertentu yang dianggap representatif. Setelah itu, dilakukan klasifikasi data berdasarkan komponen ISAK 35 untuk memudahkan proses analisis. Tahap akhir adalah interpretasi data untuk memahami pola penerapan standar akuntansi.

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen keuangan organisasi. Menurut Flick (2020), triangulasi meningkatkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif dengan cara mengonfirmasi data dari berbagai sumber. Dengan demikian, hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan ISAK 35. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola yang ditemukan.

Keabsahan data juga diperkuat melalui teknik dependability dan confirmability. Dependability dilakukan dengan memastikan bahwa proses penelitian dapat dilacak secara sistematis, sedangkan confirmability memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data yang nyata, bukan asumsi peneliti. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dalam penelitian kualitatif.

Etika penelitian juga diperhatikan dengan menjaga kerahasiaan data organisasi nirlaba yang dianalisis. Identitas organisasi tidak dipublikasikan secara eksplisit untuk menjaga privasi dan integritas lembaga. Selain itu, data yang digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan analisis ilmiah.

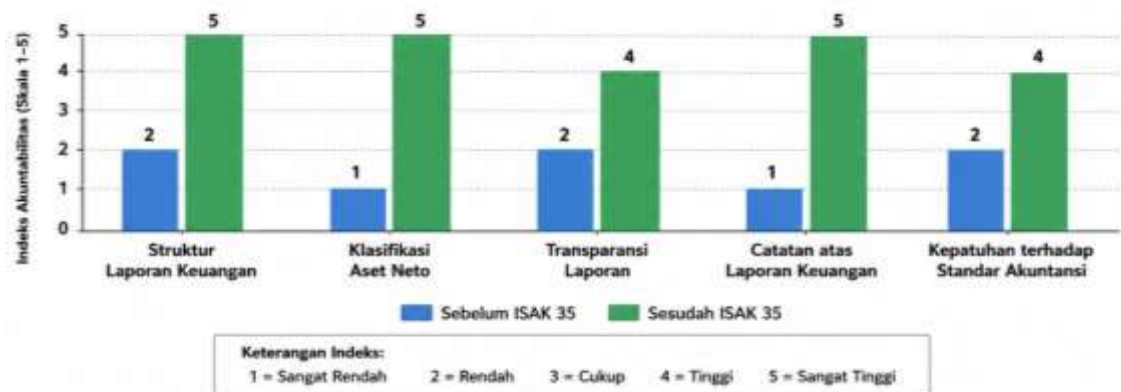
Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang hanya menggunakan data dokumentasi tanpa melibatkan data primer berbasis interaksi langsung. Namun demikian, penggunaan dokumen laporan keuangan dianggap cukup representatif untuk menilai

implementasi ISAK 35 secara objektif. Hal ini tetap memberikan gambaran yang kuat mengenai praktik akuntabilitas organisasi nirlaba.

Secara keseluruhan, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan ISAK 35 dalam konteks organisasi nirlaba di Palembang. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang lebih kaya terhadap fenomena akuntabilitas dibandingkan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian akuntansi sektor nirlaba.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengukuran tingkat akuntabilitas organisasi nirlaba di Kota Palembang dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan ISAK 35 pada lima indikator utama, yaitu struktur laporan keuangan, klasifikasi aset neto, transparansi laporan, catatan atas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi. Perbandingan nilai indeks akuntabilitas ini diukur menggunakan skala 1 hingga 5 (kategori Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi) untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana regulasi standar akuntansi mampu mentransformasi kualitas pelaporan keuangan. Hasil evaluasi perbandingan nilai indeks akuntabilitas tersebut disajikan secara rinci pada Grafik 1 berikut.



**Gambar 1. Perbandingan Tingkat Akuntabilitas
Sebelum dan Sesudah Penerapan ISAK 35**

Sumber : Diolah penulis

Gambar 1 memperlihatkan gambaran komparatif mengenai dinamika perubahan akuntabilitas entitas nirlaba sebelum dan sesudah mengadopsi ISAK 35. Secara visual, grafik ini menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada seluruh indikator akuntabilitas. Sebelum penerapan ISAK 35, tingkat akuntabilitas berada pada kategori rendah hingga sangat rendah (skor 1–2) karena pelaporan masih bersifat sederhana dan berbasis kas. Setelah penerapan ISAK 35, skor akuntabilitas mengalami kenaikan drastis menjadi kategori tinggi hingga sangat tinggi (skor 4–5), di mana peningkatan paling menonjol terjadi pada indikator klasifikasi aset neto dan catatan atas laporan keuangan yang melonjak dari skor 1 ke skor 5.

Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dokumentasi dan observasi terhadap laporan keuangan organisasi nirlaba di Kota Palembang, terjadi transformasi signifikan pada tingkat akuntabilitas organisasi sebelum dan sesudah penerapan ISAK 35. Sebelum mengadopsi ISAK 35, entitas nirlaba mayoritas berada pada skala rendah (skor 1–2) dalam seluruh indikator. Pelaporan keuangan masih sangat bersahaja, dominan berbasis kas (*cash basis*), dan tidak memisahkan aset berdasarkan pembatasan (*restrictions*). Pasca-implementasi ISAK 35, indikator akuntabilitas mengalami lonjakan drastis ke kategori tinggi hingga sangat tinggi

(skor 4–5). Lonjakan paling substantif ditemukan pada klasifikasi aset neto dan penyusunan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang melonjak dari skor 1 ke skor 5.

Tabel 1. Indikator Akuntabilitas Pasca Implementasi ISAK 35

Indikator	Sebelum ISAK 35	Sesudah ISAK 35	Kenaikan Utama
Struktur Laporan Keuangan	2	5	Terformat sesuai standar IAI
Klasifikasi Aset Neto	1	5	Pemisahan aset terikat & tidak terikat jelas
Transparansi Laporan	2	4	Kemudahan akses publik meningkat
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	1	5	Pengungkapan kebijakan akuntansi rinci
Kepatuhan Standar Akuntansi	2	4	Kesesuaian regulasi ISAK 35

Sumber : Diolah penulis

Analisis Kritis dan Pembahasan

Pembuktian Teoretis: Refleksi *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*

Kenaikan drastis pada aspek klasifikasi aset neto dan CALK memberikan bukti empiris yang memperkuat Teori *Stewardship Theory*. Pengelola organisasi nirlaba pada dasarnya berikhtiar bertindak sebagai *steward* yang amanah. Sebelum ISAK 35, kegagalan menyajikan laporan yang akuntabel bukan disebabkan oleh niat untuk memanipulasi, melainkan keterbatasan instrumen teknis pelaporan. Hadirnya ISAK 35 memberi panduan terstruktur yang memfasilitasi pengelola untuk mengartikulasikan tanggung jawab moral dan sosial mereka secara transparan.

Dari sudut pandang Teori Keagenan (*Agency Theory*), kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara pengurus (agen) dan donatur/publik (prinsipal) selama ini memicu keraguan publik. Penerapan ISAK 35 menekan asimetri informasi tersebut melalui pengungkapan komprehensif dalam CALK dan pemisahan aset neto tanpa pembatasan (*without donor restrictions*) serta dengan pembatasan (*with donor restrictions*). Hal ini membuktikan bahwa mekanisme akuntansi berbasis regulasi berfungsi efektif sebagai alat kontrol sosial (*governance mechanism*).

Komparasi Komparatif dengan Studi Terdahulu

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Adawiyah et al. (2025) dan Hartoko (2023) yang menggarisbawahi bahwa ISAK 35 secara langsung memperbaiki tata kelola dan kualitas pengungkapan entitas nirlaba. Namun, penelitian di Palembang ini mengungkapkan kebaruan (*novelty*) dan dinamika lokal yang khas:

1. Evolusi Budaya Organisasi: Penerapan ISAK 35 tidak hanya mengubah format kertas laporan, melainkan mendorong *cultural shift* internal dari pertanggungjawaban berbasis formalitas-administrasi menjadi transparansi publik yang substantif.
2. Kendala Transparansi Eksternal: Berbeda dengan indikator teknis (seperti CALK) yang mencapai nilai sempurna (5), indikator Transparansi Laporan dan Kepatuhan Standar "hanya" mencapai skor 4.

Analisis Kritis Kesenjangan Temuan (*Anomalies & Gaps*)

Pertanyaan kritis yang muncul adalah: *Mengapa indikator transparansi publik dan kepatuhan penuh belum mencapai skor maksimal (skor 5)?*

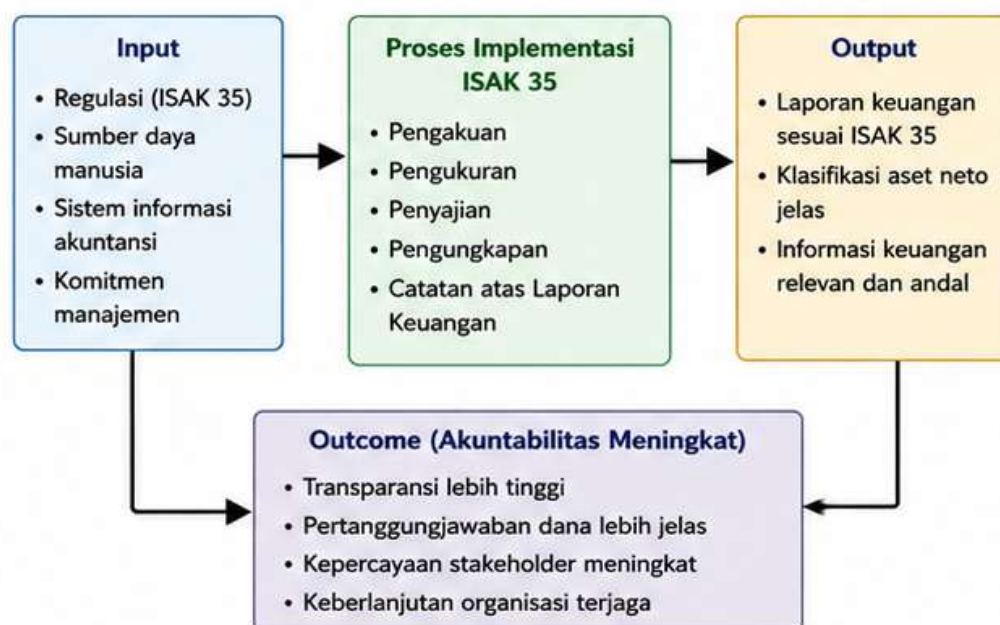
Berdasarkan analisis akar masalah (*Problem Tree*), terdapat beberapa faktor ilmiah penyebab kesenjangan tersebut:

1. Dilema Literasi Digital & Aksesibilitas: Meskipun laporan keuangan telah disusun lengkap sesuai ISAK 35, publikasi laporan tersebut masih terbatas pada kalangan internal/donatur utama dan belum diunggah secara terbuka di platform digital publik secara berkala.
2. Kapasitas SDM dan Ketergantungan Individu: Proses penyusunan ISAK 35 di lapangan kerap bergantung pada satu atau dua staf yang memiliki latar belakang akuntansi. Ketika terjadi pergantian pengurus (*turnover*), konsistensi kepatuhan standar berisiko menurun.
3. Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi (SIA): Sebagian besar entitas belum mengintegrasikan SIA berbasis software terautomasi, sehingga proses *adjustment* dari pencatatan harian ke format ISAK 35 memerlukan waktu lama dan rentan *human error*.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi Ilmiah (Teoretis): Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan membuktikan bahwa keberhasilan regulasi standar akuntansi (ISAK 35) di tingkat daerah amat ditentukan oleh kesiapan instrumen pendukung internal (SIA dan SDM) dan bukan sekadar kepatuhan regulatif (*coercive isomorphism*).
2. Implikasi Praktis:
 - a. Bagi Pengelola Nirlaba: Perlu dilakukannya digitalisasi pelaporan keuangan dan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) pendelegasian tugas agar penyusunan CALK tidak terhenti saat turnover SDM.
 - b. Bagi Regulator/IAI & Pemda: Program pendampingan ISAK 35 di daerah tidak boleh berhenti pada sosialisasi teori, melainkan pelatihan teknis penyusunan SIA sederhana berbasis aplikasi yang dapat diakses oleh organisasi nirlaba berskala kecil-menengah.

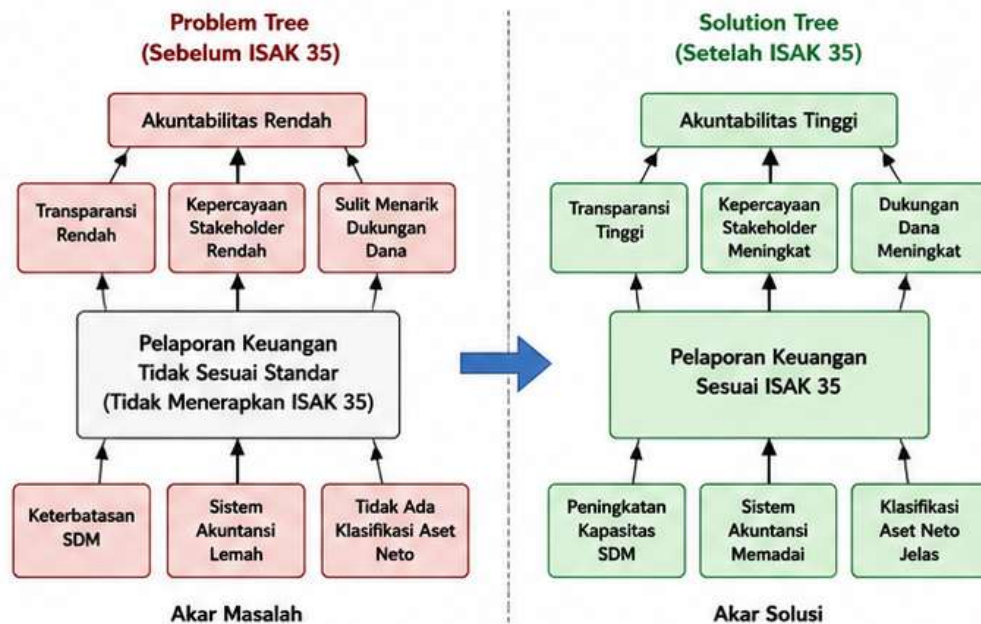
Untuk memahami bagaimana proses transformasi akuntabilitas tersebut berjalan secara konseptual dan sistematis dari tahap input hingga dampaknya terhadap keberlanjutan organisasi, alur penerapan standar akuntansi digambarkan dalam Bagan 1 di bawah ini.



Gambar 2. Kerangka Penerapan ISAK 35 dalam Penguatan Akuntabilitas Organisasi Nirlaba
Sumber : Diolah dari ISAK 35 dan hasil penelitian

Gambar 2 menguraikan kerangka kerja (*framework*) penerapan ISAK 35 yang menghubungkan empat komponen utama, yaitu *input*, proses implementasi, *output*, dan

outcome. Pada tahap *input*, pelaksanaan standar didukung oleh regulasi ISAK 35, kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, serta komitmen manajemen. Komponen-komponen tersebut diproses melalui tahap implementasi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, hingga penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Proses ini menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang terstruktur sesuai ISAK 35 dengan klasifikasi aset neto yang jelas serta informasi keuangan yang relevan dan andal. Pada akhirnya, *output* tersebut bermuara pada *outcome* berupa penguatan akuntabilitas organisasi yang ditandai oleh peningkatan transparansi, kejelasan pertanggungjawaban dana, tumbuhnya kepercayaan *stakeholder*, dan terjaganya keberlanjutan organisasi nirlaba.



Gambar 3. Problem Tree dan Solution Tree

Sumber : Diolah penulis

Gambar 3 menggambarkan analisis pohon masalah (*Problem Tree*) dan pohon solusi (*Solution Tree*) yang memetakan hubungan sebab-akibat dari praktik pelaporan keuangan organisasi nirlaba sebelum dan sesudah penerapan ISAK 35. Pada bagian *Problem Tree* (Sebelum ISAK 35), ditunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas SDM, sistem akuntansi yang lemah, dan ketiadaan klasifikasi aset neto menjadi akar masalah utama yang menyebabkan pelaporan keuangan tidak sesuai standar. Dampak turunan dari akar masalah ini adalah timbulnya transparansi yang rendah, merosotnya kepercayaan *stakeholder*, serta sulitnya menarik dukungan dana, yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya akuntabilitas organisasi secara keseluruhan. Sebaliknya, pada bagian *Solution Tree* (Setelah ISAK 35), ditunjukkan alur penyelesaian masalah di mana peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sistem akuntansi yang memadai, dan pemisahan klasifikasi aset neto secara jelas menjadi akar solusi untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Penerapan standar ini secara langsung menghasilkan dampak positif berupa transparansi yang tinggi, peningkatan kepercayaan *stakeholder*, dan menguatnya dukungan dana, sehingga berhasil mendorong terciptanya akuntabilitas organisasi nirlaba yang tinggi dan berkelanjutan.

Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan infografik hasil penelitian, terlihat adanya peningkatan signifikan tingkat akuntabilitas organisasi nirlaba setelah penerapan ISAK 35 pada seluruh indikator yang diukur, yaitu struktur laporan keuangan, klasifikasi aset neto, transparansi laporan, catatan atas laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Data menunjukkan bahwa sebelum

penerapan ISAK 35, tingkat akuntabilitas berada pada kategori rendah hingga sangat rendah dengan rentang skor 1–2 pada seluruh indikator. Setelah penerapan ISAK 35, terjadi peningkatan drastis dengan skor berada pada rentang 4–5 yang menunjukkan kategori tinggi hingga sangat tinggi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator klasifikasi aset neto, catatan atas laporan keuangan, serta struktur laporan keuangan yang masing-masing meningkat dari skor 1–2 menjadi skor 5. Sementara itu, indikator transparansi laporan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi juga mengalami peningkatan dari kategori rendah menjadi tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi ISAK 35 berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan organisasi nirlaba secara sistematis dan terstruktur. Secara visual, hasil tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Tingkat Akuntabilitas
Sebelum dan Sesudah Penerapan ISAK 35**

Indikator	Sebelum ISAK 35	Sesudah ISAK 35
Struktur laporan keuangan	2	5
Klasifikasi aset neto	1	5
Transparansi laporan	2	4
Catatan atas laporan keuangan	1	5
Kepatuhan standar akuntansi	2	4

Sumber : Diolah penulis

Pola tersebut menunjukkan adanya perubahan struktural yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam praktik akuntansi organisasi nirlaba.

Pembahasan dan Interpretasi Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ISAK 35 memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Hal ini sejalan dengan temuan Adawiyah, Daulay, dan Syahbudi (2025) yang menyatakan bahwa ISAK 35 berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan yang lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan pada seluruh indikator dalam penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Hartoko (2023) yang menemukan bahwa banyak organisasi nirlaba mengalami perbaikan kualitas laporan keuangan setelah mengadopsi ISAK 35, terutama dalam hal pengungkapan informasi dan struktur pelaporan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat konsensus akademik bahwa ISAK 35 merupakan instrumen penting dalam reformasi akuntansi sektor nirlaba.

Jika dikaitkan dengan teori akuntabilitas, peningkatan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *stewardship theory* yang menekankan bahwa pengelola organisasi memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang transparan dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, ISAK 35 berfungsi sebagai mekanisme formal yang memperkuat sistem pelaporan sehingga mengurangi asimetri informasi antara pengelola dan stakeholder. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Budiarmo dan Maradesa (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan ISAK 35 meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena laporan keuangan menjadi lebih informatif dan sesuai standar. Selain itu, penelitian Septiana, Imtikhanah, dan Hidayah (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar pelaporan yang baku seperti ISAK 35.

Temuan peningkatan signifikan pada aspek klasifikasi aset neto dan catatan atas laporan keuangan menunjukkan bahwa ISAK 35 tidak hanya memperbaiki format laporan, tetapi juga meningkatkan pemahaman organisasi terhadap struktur keuangan mereka sendiri. Hal ini memperluas temuan Indriastuti (2023) yang menyatakan bahwa implementasi ISAK 35 mendorong pelaporan yang lebih sistematis, rinci, dan amanah dalam pengelolaan dana

organisasi nirlaba. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan memberikan bukti empiris berbasis perbandingan sebelum dan sesudah implementasi standar.

Dari perspektif praktik, peningkatan akuntabilitas juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan stakeholder, yang merupakan elemen penting dalam keberlanjutan organisasi nirlaba. Hal ini konsisten dengan temuan Swandari dan Maradesa (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan ISAK 35 meningkatkan legitimasi organisasi di mata publik karena laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Oleh karena itu, ISAK 35 tidak hanya berfungsi sebagai standar teknis akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola (*governance tool*) yang memperkuat hubungan antara organisasi dan stakeholder.

Implikasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ISAK 35 memiliki implikasi strategis terhadap penguatan sistem akuntabilitas organisasi nirlaba. Pertama, organisasi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi berbasis standar ISAK 35 agar implementasi berjalan optimal. Kedua, diperlukan penguatan sistem informasi akuntansi untuk memastikan pencatatan transaksi dilakukan secara konsisten dan sesuai standar. Ketiga, organisasi disarankan untuk melakukan audit internal secara berkala guna memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan. Keempat, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas variabel seperti efektivitas pengendalian internal atau tingkat kepercayaan donor untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dengan demikian, implementasi ISAK 35 tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga pada keberlanjutan dan profesionalisme organisasi nirlaba secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penerapan ISAK 35 dalam penguatan akuntabilitas organisasi nirlaba berbasis regulasi akuntansi di Kota Palembang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi ISAK 35 terbukti secara signifikan meningkatkan akuntabilitas organisasi nirlaba, mentransformasi sistem pelaporan dari pencatatan berbasis kas yang sederhana menjadi pelaporan standar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan paling substantif terjadi pada pemisahan klasifikasi aset neto dan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa ISAK 35 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis akuntansi, melainkan sebagai instrumen tata kelola (*governance tool*) yang efektif menekan asimetri informasi dan menguatkan fungsi *stewardship* pengelola nirlaba. Keberhasilan adopsi standar ini di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan regulasi, melainkan sangat bergantung pada kapasitas internal organisasi, khususnya kompetensi SDM keuangan dan ketersediaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

Saran

Implikasi Praktis (Berdasarkan Temuan Keterbatasan SDM dan SIA)

1. Bagi Pengelola Organisasi Nirlaba: Disarankan untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaporan keuangan dan mentransisikan pencatatan ke Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis digital sederhana guna meminimalisasi risiko penurunan kualitas laporan akibat *turnover* SDM.
2. Bagi IAI dan Pemerintah Daerah: Disarankan untuk menggeser pola pembinaan dari sosialisasi regulasi yang bersifat teoritis menjadi pelatihan teknis aplikatif penyusunan SIA nirlaba yang sesuai dengan skala kemampuan organisasi lokal.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan (Berdasarkan Keterbatasan Penelitian)

1. Mengingat penelitian ini terbatas pada analisis dokumen kualitatif di wilayah Palembang, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed-methods* dengan cakupan wilayah yang lebih luas untuk menguji generalisasi temuan.
2. Penelitian mendatang disarankan mengintegrasikan variabel lain seperti *efektivitas sistem pengendalian internal* dan *tingkat digitalisasi pelaporan* terhadap tingkat kepercayaan serta retensi donatur dalam jangka panjang

REFERENSI

- Adawiyah, S., Daulay, A. N., & Syahbudi, M. (2025). ISAK 35 to improve accountability and transparency in nonprofit organizations. *Academia Open*, 10(2), 11761. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11761>
- Aditya, M. (2025). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan konsistensi laporan keuangan berbasis ISAK 35. *Akrual: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 50–62. <https://doi.org/10.34005/akrual.v7i1.5070>
- Ahdi, D., Pramono, A., & Wijayanti, R. (2024). Implementation of ISAK 35 and financial transparency in nonprofit organizations. *Journal of Accounting and Governance*, 15(1), 45–59.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Budiarso, N. S., & Maradesa, D. (2025). Penerapan ISAK 35 dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nonlaba. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.58784/mbkk.53>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Flick, U. (2020). *Introducing research methodology: Thinking your way through your research project* (3rd ed.). Sage Publications.
- Hartoko, M. S. (2023). Implementasi ISAK 35 pada organisasi nirlaba. *Wacana Equilibrium*, 11(2), 132–141. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.02.132-141>
- Hasibuan, R. A., Siregar, N., & Harahap, D. A. (2024). Human resource capacity and nonprofit financial reporting compliance: Evidence from Indonesian nonprofit organizations. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 75–90.
- Hidayat, R., Firmansyah, A., & Nugroho, Y. (2024). Accountability and governance practices in nonprofit organizations: The role of ISAK 35 implementation. *International Journal of Public Sector Accounting*, 11(2), 98–115.
- Hidayat, R., Harmain, H., Syarvina, W., & Basri, T. H. (2024). Akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(1), 32–45. <https://doi.org/10.62194/3723xy36>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriastuti, M. (2023). Implementasi ISAK 35 sebagai manifestasi sifat amanah pada organisasi nirlaba. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 7(2), 92–108. <https://doi.org/10.35837/subs.v7i2.2446>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniawan, T., & Lestari, S. (2024). Implementation of ISAK 35 and financial transparency in educational and religious nonprofit organizations. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 88–104.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Publisher.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nurhayati, E. (2023). Accountability and implementation of ISAK 35 in nonprofit organizations in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(3), 255–270.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861684>
- Rahayu, S., & Pratama, A. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas nonlaba berbasis ISAK 35. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, 28(1), 15–28.
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2020). *Research methods for business students* (8th ed.). Pearson Education.
- Septiana, S. N., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2025). Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sesuai ISAK 35. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 21(2), 115–128. <https://doi.org/10.48144/neraca.v21i2.1871>
- Setiadi, A. (2023). Financial literacy and implementation of ISAK 35 in nonprofit organizations. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(3), 221–235.
- Setiawan, R., & Prabowo, A. (2022). Challenges in implementing ISAK 35 in nonprofit organizations in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 45–60.
- Siregar, D., Nasution, J., & Lubis, A. (2024). Implementation gap in nonprofit accounting standards: Evidence from community-based organizations in Indonesia. *International Journal of Accounting Studies*, 8(1), 45–60.
- Wulandari, R., & Saputra, A. (2023). Peran kepemimpinan dan komitmen organisasi dalam efektivitas implementasi standar akuntansi nirlaba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 19(2), 101–114.
- Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Sage Publications.